

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Doddy Bahtera Sentosa Panjaitan

NPP. 30.0088

Asdaf Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: doddybspanjaitan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dadan Adam Ismail S.E,S.IP,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : Flood is an event where an area or land is submerged due to increased water volume. The impact of flood disasters is considered highly detrimental to the community. Therefore, the performance of the Regional Disaster Management Agency is crucial in implementing mitigation measures to reduce the risks and impacts of flood disasters. **Purpose :** The purpose of this research is to determine the performance of the Regional Disaster Management Agency in flood disaster mitigation, as well as identifying the inhibiting factors and efforts made to address these barriers. **Method :** This research utilizes a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Performance will be measured using Dwiyanto's dimensions, namely productivity, service quality, responsiveness, accountability, and responsibility. **Result :** The results of this research indicate that the Regional Disaster Management Agency's performance is not yet optimal, as seen through the five performance dimensions used. The causes are attributed to several constraints in its implementation, such as inadequate infrastructure, insufficient staff, and lack of community awareness regarding flood risks. However, efforts have been made to overcome these barriers, including providing training to residents and Task Forces within the Regional Disaster Management Agency of Bandung District, conducting public awareness campaigns on floods, and developing long-term plans for the maintenance and improvement of infrastructure. **Conclusion :** The implementation of flood disaster mitigation efforts by the Regional Disaster Management Agency in Bandung District is still suboptimal due to various inhibiting factors. Insufficient human resources or personnel availability is one of the key factors. Additionally, the lack of transportation available for personnel to reach affected areas poses a challenge to implementation. Furthermore, the community's awareness of the dangers and risks of floods remains insufficient. Thus, these factors become the main obstacles in flood mitigation efforts.

Keywords : Performance, Disaster Management, Flood

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Banjir adalah kejadian di mana suatu daerah atau daratan terendam karena volume air yang meningkat. Dampak dari bencana banjir dianggap sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat diperlukan dalam menerapkan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko dari bencana banjir. **Tujuan**

: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja akan diukur dengan menggunakan ukuran menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan** : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kinerja yang belum optimal, dilihat dari lima ukuran kinerja yang digunakan. Penyebabnya adalah adanya beberapa kendala dalam penerapannya, seperti sarana prasarana yang kurang memadai, jumlah pegawai yang kurang, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir. Namun, untuk mengatasi faktor hambatan tersebut, dilakukan upaya-upaya seperti memberikan pelatihan bagi warga dan Satuan Tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai banjir, dan membuat rencana jangka panjang untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana. **Kesimpulan** : Pelaksanaan upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bandung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum optimal karena adanya berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dalam upaya untuk mencegah banjir di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia atau personil yang tersedia. Selain itu, minimnya transportasi yang tersedia untuk personil menuju lokasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko banjir masih kurang. Sehingga semua hal ini menjadi kendala utama dalam upaya mitigasi banjir.

Kata kunci: Kinerja, Penanggulangan Bencana, Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letak Indonesia yang diapit antara dua benua dan dua Samudera membuat negara Indonesia dilewati oleh angin Muson Barat dan angin Muson Timur. Dimana Kedua angin tersebut sangat mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Pergerakan angin Muson Timur akan dimulai dari benua Australia menuju benua Asia. Udara kering dari gurun pasir yang ada di bagian utara Australia akan dibawa oleh angin Muson Timur melalui laut yang sangat sempit. Oleh sebab itu, angin Muson Timur akan menyebabkan musim kemarau terjadi di Indonesia. Sedangkan pergerakan angin Muson Barat akan melewati Samudera Hindia, kemudian menuju ke benua Australia. Dari pergerakan itulah, angin Muson Barat akan membawa uap air dari daratan yang sangat banyak, sehingga akan menyebabkan terjadinya musim hujan di beberapa wilayah Indonesia sehingga menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana banjir.

Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1500 - 4000 mm/tahun, dengan suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C. Maka Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Maka sangatlah memungkinkan jika berdasarkan data kasus kebencanaan di Kabupaten Bandung tahun 2022 yang bersumber dari BPBD Jawa barat, bencana banjir di Kabupaten Bandung menunjukan angka yang cukup tinggi dibanding Kabupaten lainnya di Jawa Barat yaitu 52 kasus.

Dengan berdasarkan pada observasi awal penulis terhadap bencana banjir di Kabupaten Bandung, penulis masih menemukan beberapa permasalahan yang muncul dan terjadi pada wilayah Kabupaten Bandung yang bersumber dari Open Data Jabar yaitu, jumlah kejadian bencana banjir di

Kabupaten Bandung yang belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan hingga akhirnya naik relatif tinggi :

Tabel 1.1
Jumlah Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah Kejadian Banjir
2018	19
2019	18
2020	19
2021	50

Sumber : Open Data Jabar (data diolah oleh penulis, 2022)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus bencana banjir tidak mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sekaligus menjadi salah satu jumlah kasus terbanyak di Kabupaten Bandung. Jumlah kasus di Kabupaten Bandung sekarang pada tahun 2022 sendiri sudah di angka 52 kasus meskipun belum sampai bulan Desember. Maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2022, telah menjadi tahun dengan jumlah kasus banjir terbanyak selama 5 tahun terakhir.

Besarnya angka kejadian banjir di Kabupaten Bandung dikarenakan drainase yang masih buruk. Hal ini disebabkan oleh pendangkalan saluran yang terjadi karena adanya penumpukan lumpur, kotoran atau sampah, serta struktur drainase yang tidak sanggup menerima air saat hujan deras. Serta kurangnya tenaga kerja yang turun ke lapangan menjadi kendala yang menghambat. Maka terlihat bahwa sangat pentingnya kinerja dari BPBD.

Menurut Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto, 2017: 105) berpendapat bahwa kinerja ialah banyaknya upaya yang dilakukan individu terhadap pekerjaannya. Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemauan individu atau kelompok untuk melakukan tugas atau memperbaiki tugas tersebut dengan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sering kali dikaitkan dengan penampilan. Kinerja pegawai sangatlah dibutuhkan, untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur yang dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kinerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berlandaskan akan data yang ada menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam menanggulangi bencana terutama dalam bentuk mitigasi bencana atau melakukan tindakan saat pra bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana atau mitigasi telah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten atau Kota, ranah tanggung jawab kendali ada di BPBD. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pengurangan risiko bencana, melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan materi dan membangun kesadaran serta kapasitas untuk merespons ancaman bencana. Mitigasi bencana sangat diperlukan, karena mitigasi bencana juga bertujuan agar masyarakat sadar dan siap dalam menghadapi bencana yang tidak diharapkan terjadi. Mitigasi bencana sangat penting karena dapat mengurangi dampak ancaman bencana yang sangat merugikan. Mitigasi ini sendiri masih belum terlaksana dengan baik, terutama di Kabupaten Bandung yang mana menunjukkan masih kurang baiknya kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi permasalahan penting. Berdasarkan permasalahan itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat**”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggunakan metode penelitian serta berbagai jenis lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Desriyani Dakka dengan judul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong* (Dakka, 2020), menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menunjukkan hasil adanya sampah plastik yang menumpuk di saluran pembuangan menyebabkan air meluap ke jalan raya dan merendam rumah-rumah warga yang berada di daerah rendah, BPBD yang bertugas menangani bencana menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Penelitian oleh Susi Sulandari yang berjudul *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang* (Sulandari, 2018), menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar penulisan penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang disetiap tahapan bencana belum maksimal dapat dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas. Contoh pada produktivitas BPBD masih terdapat program atau kegiatan yang tidak mencapai target disetiap tahapan bencana yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan Chandra Yudiana Efendi dengan judul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung* (Efendi, 2013), menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar dalam penyusunannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dalam mengatasi banjir secara umum dapat disebut memuaskan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya terutama pada permasalahan dana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menunjukkan kualitas kinerja pada titik permasalahan yang berbeda – beda. Pada penelitian oleh Dakka menunjukkan permasalahan kinerja pada kemampuan BPBD dalam mensosialisasi masyarakat akan pentingnya kondisi lingkungan. Di sisi lain, Sulandari menunjukkan kritisnya kondisi kinerja melalui tidak terlaksananya berbagai program dan kegiatan dalam mitigasi banjir. Kemudian penelitian oleh Efendi menunjukkan permasalahan pada dana untuk pelaksanaan mitigasi. Sedangkan peneliti sendiri berfokus pada permasalahan akan jumlah pegawai yang kurang dengan melihat pada luasnya daerah kerjanya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Dalam pendekatan kualitatif ini Yusuf menjelaskan bila pada prinsipnya semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menggambarkan, mendeskripsikan, atau menerangkan suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat untuk menemukan meaning dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting) (Yusuf, 2014). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Sekretariat, Kepala Seksi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan tiga orang masyarakat setempat. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi atas PERPUB 99 Tahun 2022 mengenai rencana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 - 2026. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto. Teori tersebut terdiri dari beberapa indikator yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Selain itu dilakukan juga analisis terhadap factor penghambat dalam mitigasi banjir serta upaya atau solusi penanganannya. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Konsep produktivitas secara umum mencakup input dan output, yang mengacu pada hasil yang diperoleh atau dicapai dalam kurun waktu atau periode tertentu, usaha apa yang telah dilakukan, dan berapa banyak usaha yang telah dilakukan. Namun, konsep produktivitas diperluas dengan menambahkan bagaimana pelayanan publik mencapai hasil yang ditargetkan sebagai salah satu ukuran kinerja. Konsep produktivitas dalam penelitian ini menekankan sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung melaksanakan penanggulangan banjir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa sasaran tujuan dari BPBD :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2018			2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Rata-rata Responstime penanganan Penanggulangan bencana	100	100	100	100%	100%	100	100%	93.82%	93.82	100%	100%	100
2	Meningkatnya sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana	Persentase Meningkatnya sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana	70	70	100	80%	80%	100	90%	100%	111	100%	73,34%	73,34
3	Meningkatnya mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang telah termitigasi	85	85	100	90%	90%	100	95%	94.43%	99.38	100%	100%	100
		Jumlah SDM aparatur dan masyarakat yang terlatih di bidang kebencanaan	1150	1150	100	1250	1455	106	1275	0	0	1325	1984	149,73
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	61	61,47	61,47	61.5	64,01	1.04	62	70.98	114.4	74	71,65	96,82
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	100	100	100	80%	88,7	110	90%	61.24%	68.04	100%	89,61	89,61

Sumber : data diolah dari PERPUB 99 Tahun 2022 mengenai rencana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 - 2026

Tabel 3.1 di atas menunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berusaha sebaik mungkin dalam upaya penurunan resiko bencana, tidak hanya berfokus pada banjir saja tetapi juga pada seluruh potensi bencana yang ada. Hasilnya sudah cukup memuaskan meskipun tidak berada pada titik maksimal, terutama pada sasaran akan peningkatan sarana dan prasarana tetapi sudah mampu menekan angka potensi resiko bencana.

3.2. Kualitas Layanan

Indikator mutu pelayanan atau service quality menjadi dasar utama untuk memahami kepuasan pemakai jasa atau konsumen. Kualitas pelayanan yang baik dan terbaik selalu dikaitkan dengan ketepatan waktu dan mekanisme pelayanan yang tepat. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk secara langsung maupun tidak langsung merasakan kualitas pelayanan yang diberikan, dan memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, serta menggunakannya sebagai indikator kinerja organisasi publik. Kualitas pelayanan suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi karena kualitas pelayanan suatu organisasi dapat memberikan gambaran atau nilai tentang suatu organisasi jasa itu baik atau buruk. Selain itu, transparansi, hak dan kewajiban yang sama untuk semua, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditegakkan oleh organisasi publik dalam memberikan layanan mereka. Organisasi publik harus mempertimbangkan beberapa hal seperti proses, petugas pelayanan, tanggung jawab dinas, kemampuan petugas pelayanan, ketepatan pelayanan, keadilan penyediaan pelayanan, etika petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian waktu pelayanan, kenyamanan lokasi pelayanan, keamanan pelayanan, dan sebagainya untuk penyediaan layanan mereka.

Dengan memperhatikan semua hal tersebut dengan baik, diharapkan kualitas layanan yang diberikan oleh suatu organisasi publik dapat maksimal dan memberikan kepuasan bagi konsumen atau pemakai jasa. Prinsip-prinsip transparansi, hak dan kewajiban yang sama untuk semua, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, setiap organisasi publik harus menerapkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Bapak Dadang Sumpena, S.IP., MM selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung berkata bahwa pelayanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Dengan adanya kendala dalam jumlah personil membuat pelayanan masih belum bisa dibilang baik. Akan tetapi berbanding terbalik dari informasi Pak Carlos selaku masyarakat yang mengaku bahwa pelayanan sudah berjalan baik melalui pembangunan structural seperti Gedung Pengungsian di Dayeuhkolot.

3.3. Responsivitas

Responsivitas merupakan tolak ukur yang mengevaluasi kemampuan suatu organisasi dalam memahami dan memenuhi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, perlu dijadikan sebagai indikator kinerja karena kemampuan suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung juga diharapkan memiliki kemampuan yang responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari, mempertimbangkan, dan menyusun strategi yang tepat untuk merespons keluhan, tuntutan, serta kritik yang diberikan oleh masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan mitigasi banjir berkerja sama bersinergi dengan OPD lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Termasuk dalam hal strategi dan kecepatan, ketepatan dalam mensukseskan kegiatan. Kami selalu berkoordinasi dengan OPD lainnya untuk merencanakan strategi serta mencari tahu keluhan pada masyarakat, karena hal ini merupakan suatu hal yang penting guna mensukseskan pelaksanaan mitigasi banjir.

3.4. Responsibilitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat. Terkadang, organisasi perlu mengambil tindakan atau keputusan yang tidak selalu sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk merespons kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan cepat. Oleh karena itu, perlu dijaga keseimbangan antara responsibilitas dan responsivitas, di mana organisasi harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil tetap mengikuti prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah

Dalam kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, memiliki tanggung jawab dalam bertindak dengan kesadaran untuk mengikuti aturan yang ada dan memastikan bahwa tindakan mereka mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti yang tertuang di dalam aturan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Maka BPBD Kabupaten Bandung melakukan pelatihan kepada desa dan kelurahan daerah rawan bencana banjir. Contohnya pada Desa Cileunyi Kulon di Kecamatan Cileunyi.

3.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dikatakan juga sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode. Dalam penelitian ini indikator akuntabilitas berfungsi untuk menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan mitigasi banjir yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dengan nilai yang ada pada masyarakat.

Nilai utama yang dimajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah nilai sosial, dimana tidak adanya perbedaan masyarakat dalam mitigasi banjir. Dapat di katakan upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung sudah menuju ke tahap yang lebih baik. Di samping itu kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir. Contohnya pak Carlos sebagai masyarakat pendatang dari NTT juga di perhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

3.6. Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung

Dalam meneliti faktor penghambat yang ada maka peneliti melihat dari pendapat Soesilo dalam Hessel Nogi (2005 : 180), yang mengambil 3 faktor yang terlihat menjadi masalah bagi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Kedatangan bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, baik dalam hal waktu, lokasi, skala, dan jumlah bencana yang terjadi. Beberapa bencana mungkin muncul dalam skala kecil atau besar, dan beberapa dapat terjadi pada waktu dan lokasi yang sama atau berbeda. Ketika bencana

terjadi dalam skala kecil, maka biasanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung masih dapat menanganinya dengan jumlah personil yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Namun, ketika bencana mencapai skala besar dan penanganannya menjadi lebih kompleks, maka dibutuhkan jumlah personil yang lebih banyak dalam penanggulangannya.

Tabel 3.2
Keberadaan Personil Non PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TKK (SLTA)	-
2	Pekerja Harian Lepas (PHL)	-
	S1	7
	D3	5
	SLTA/STM	40
	SLTP	3
	SD	0
	Jumlah	55

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Dalam upaya untuk mencapai target dalam mitigasi banjir di Kabupaten Bandung sesuai dengan waktu yang ditentukan, diperlukan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Namun, saat ini BPBD mengalami faktor penghambat dalam hal ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung memiliki jumlah personil yang tidak seimbang dengan situasi yang dihadapi dalam upaya penanggulangan bencana, terutama pada saat situasi darurat. Kendala yang dihadapi terletak pada penilaian kebutuhan pegawai atau evaluasi langsung ke lokasi, baik itu lokasi bencana banjir atau lokasi bencana lainnya.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pengurangan resiko banjir tidak lepas dari sangkut paut dari sarana dan prasarana. Setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan haruslah ditunjang oleh berbagai fasilitas yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas. Akan tetapi dalam penanggulangan bencana, sering terjadi keluhan dari para personil terkait transportasi. Dengan luasnya Kabupaten Bandung membuat setiap orang kesulitan untuk mencapai lokasi bila tidak adanya transportasi. Selain itu, masih ada juga beberapa fasilitas yang mulai tidak bekerja sebaik dulu.

Tabel 3.3
Jumlah Transportasi BPBD Kabupaten Bandung

No	Nama Transportasi	Jumlah Satuan	Pemilik	Kondisi
1	Mobil Rescue (Double Cabin)	3 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik
2	Mobil Pick Up Rescue	2 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik
3	Mobil Tangki Air	1 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik
4	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik
5	Truck Serbaguna	1 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik
6	Motor KLX	11 Unit	BPBD Kab Bandung	2 Rusak
7	Motor Cator 3 Roda	1 Unit	BPBD Kab Bandung	Baik

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

c. Kesadaran Dari Masyarakat

Kesadaran atau perhatian masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar aliran sungai masih kurang terhadap lingkungan sekitarnya. Masih ada masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menyebabkan sumbatan di aliran sungai. Selain

itu, masyarakat juga sering kali kurang menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dengan tidak membersihkan saluran drainase dan membuang sampah sembarangan.

3.7. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung

Dalam menanggapi permasalahan yang ada, maka BPBD Kabupaten Bandung melakukan beberapa upaya, diantaranya :

a. Pelatihan Kepada Masyarakat serta Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung melakukan upaya lain untuk mencegah terjadinya bencana banjir, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan Satuan Tugas yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi relawan bencana dalam membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kegiatan pencegahan bencana banjir.

b. Mengenalkan dan Mensosialisasikan Sumber Bahaya Atau Ancaman Kepada Masyarakat
Dalam upaya pencegahan bencana banjir di masyarakat, penting untuk memberikan pengenalan tentang bahaya dan ancaman yang dapat disebabkan oleh banjir. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir merupakan hal yang krusial untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang banjir dan upaya pencegahan yang akan dilakukan di masa depan. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan mereka dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

c. Rencana Jangka Panjang Untuk Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.
Dalam menghadapi masalah kurangnya sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Bandung, direncanakan pemeliharaan dan peningkatan sebagai langkah strategis yang penting. Membuat rencana jangka panjang untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana memberikan manfaat yang signifikan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis yang dilakukan terhadap Kinerja dari BPBD Kabupaten Bandung dengan berlandaskan pada teori Dwiyanto ini dapat mengukur tingkat kemampuan Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan mitigasi bencana banjir. Penulis menemukan temuan penting yakni Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai daerah yang luas dalam upaya penanganan bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan fakta bahwa personil mendapatkan permasalahan dalam menanggapi bencana karena jauhnya lokasi kejadian bencana.

Permasalahan yang terkait dengan proses menuju lokasi bencana di Kabupaten Bandung menyoroti tingginya ketergantungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap sarana dan prasarana. Dalam menghadapi bencana, penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera merespons dan mencapai lokasi yang terkena dampak dengan cepat dan efektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses tersebut. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sarana transportasi yang memadai. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang luas dengan medan yang beragam, termasuk daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kurangnya aksesibilitas ke lokasi-lokasi terdampak bencana menjadi hambatan dalam memberikan bantuan dan respon yang tepat waktu. Sarana transportasi seperti kendaraan darat atau perahu seringkali terbatas jumlahnya atau tidak memadai untuk menjangkau daerah-daerah terpencil tersebut.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan sebuah fakta menarik dalam pelaksanaan penelitian. Hal itu ialah tentang tidak adanya visi dan misi utama yang dimiliki. Sebaliknya mereka menggunakan visi misi milik bupati Bandung sebagai patokan arah kerja.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bandung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih belum optimal karena adanya berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia atau personil yang tersedia. Selain itu, minimnya transportasi yang tersedia untuk personil menuju lokasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko banjir masih kurang. Sehingga semua hal ini menjadi kendala utama dalam upaya mitigasi banjir. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan memberikan pelatihan kepada warga dan Satuan Tugas, dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dan dibuat rencana jangka panjang untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Dwiyanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun selanjutnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sekretariat, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bintoro, D .2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Malang : Gava Media.

Dakka, D., Sattu, S. and Kalagison, M.D., 2020. "KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM KESIPSIAGAAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SORONG". Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2), pp.1-10

Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.

Syafril, S. and Sulandari, S., 2018. "ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI

KOTA SEMARANG”. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(1), pp.65-81.

TANGKILISAN, Hessel Nogi S. *Manajemen publik*. Grasindo, 2005.

Yudiana Efendi, C. 2013. “*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*”. (Suatu Studi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

